

## DAFTAR TABEL/GAMBAR

TABEL 1 : PAGU ANGGARAN & REALISASI PENGGUNAAN

GAMBAR 1.1 : DUA FUNGSI UTAMA LAKIP .....	5
GAMBAR 1.2 : SISTIMATIKA PENULISAN LAKIP .....	7
GAMBAR 1.3 : RENCANA STRATEGIS .....	10

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : FORMULIR RENCANA KINERJA KEGIATAN BPPPAKB PROVINSI  
RIAU TAHUN ANGGARAN 2012

LAMPIRAN II : FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN BPPPAKB  
PROVINSI RIAU TAHUN 2012

LAMPIRAN III : RENCANA STRATEGIS BPPPAKB PROVINSI RIAU TAHUN 2009- 2013

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau adalah suatu lembaga pemerintah Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

### B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau maka Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

#### 1. Tugas Pokok

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

## 2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada point 1, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum di bidang Sekretariat, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang Sekretariat, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

### C. Aspek Strategis

Berkaitan dengan pencapaian target RPJMD Tahun 2016 – 2019, ditetapkan pokok strategis dan kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yang difokuskan pada 6 (enam) strategi yaitu :

1. Memantapkan Program Keluarga Berencana
2. Mendorong Peran Perempuan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga
3. Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Mengoptimalkan Peran Perempuan di bidang Politik
5. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak
6. Meningkatkan upaya Perlindungan Perempuan dan Anak di berbagai bidang

### D. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2015 adalah :

1. Kepala
2. Sekretaris
3. Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
4. Bidang Perlindungan Anak
5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Secara rinci struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

#### E. Sistematika Penyusunan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau selama tahun 2016. Capaian kinerja tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau serta struktur organisasi

Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dan Penetapan Kinerja Tahun 2016

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2016

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana disebutkan pada uraian terdahulu bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau diberi tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum di bidang Sekretariat, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang Sekretariat, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

#### A. RPJMD 2014-2019

RPJMD 2014 – 2019 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Provinsi Riau di segala bidang dengan meningkatkan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan pemantapan aparatur. Berkaitan dengan ini telah ditetapkan Visi Provinsi Riau adalah “ *Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, Masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur*”.

Visi tersebut dijabarkan dalam 9 misi, namun diantara kesembilan misi yang terkait dengan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau adalah : Misi ketiga yaitu Meningkatkan Pelayanan Kesehatan;

Misi keempat yaitu menurunkan kemiskinan; Misi keenam yaitu Pembangunan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa serta pemantapan stabilitas politik.

## B. Rencana Strategis Tahun 2014 – 2019

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 merupakan perencanaan jangka menengah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yang berisi gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau telah mengacu kepada RPJMD Tahun 2016 – 2019 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Secara ringkas substansi Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dapat diilustrasikan sebagai berikut :

### 1. Visi BPPPAKB Provinsi Riau

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan penjabaran Visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau serta Prioritas Pembangunan Nasional. Disamping itu Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau juga mengacu pada visi dan misi Gubernur Terpilih.

*VISI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU adalah :*

*“Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, terlindunginya hak – hak perempuan dan anak serta meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan keluarga yang berkualitas menuju masyarakat Riau yang sejahtera”*

### 2. Misi BPPPAKB Provinsi Riau

Misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yang terkait dengan visi dan misi Gubernur terpilih yakni pada Misi ketiga yaitu Meningkatkan Pelayanan Kesehatan; Misi keempat yaitu

menurunkan kemiskinan; Misi keenam yaitu Pembangunan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa serta pemantapan stabilitas politik.

Misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud. Rumusan misi yang diangkat dalam Renstra BPPPAKB Provinsi Riau 2014 – 2018 didasarkan pada isu-isu strategis lingkup BPPPAKB Provinsi Riau untuk lima tahun kedepan, yang merupakan penjabaran dari Visi BPPPAKB Provinsi Riau yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
- b. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindakan kekerasan
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan anak
- d. Merevitalisasi Program Keluarga Berencana sebagai upaya menuju Keluarga Sejahtera
- e. Meningkatkan kapasitas PUG menuju Keadilan dan Kesenjangan Gender

### C. Tujuan, Sasaran

#### 1. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2019, yaitu :

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk
- b. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam bidang segala aspek pembangunan
- c. Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat miskin

#### 2. Sasaran

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Sasaran	Indikator Kinerja Utama
Tujuan 1 : Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	
Sasaran strategis 1 : Terkendalnya angka kelahiran dan kematian Ibu dan Anak	1. Rasio akseptor KB aktif per Jumlah Pasangan Usia Subur 2. Jumlah akseptor KB baru khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Tujuan 2 : Meningkatkan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam bidang segala aspek pembangunan	
Sasaran strategis 2 : Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender di segala aspek pembangunan	1. Persentase Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
Tujuan 3 : Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat miskin	
Sasaran strategis 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Miskin	1. Jumlah perempuan yang telah diberi pelatihan untuk meningkatkan ekonomi keluarga

### 3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2016 – 2019.

Sasaran	Indikator Kinerja Utama
Tujuan 1 : Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	
Sasaran strategis 1 : Terkendalnya angka kelahiran dan kematian Ibu dan Anak	1. Rasio akseptor KB aktif per Jumlah Pasangan Usia Subur 2. Jumlah akseptor KB baru khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Tujuan 2 : Meningkatkan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam bidang segala aspek pembangunan	
Sasaran strategis 2 : Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender di segala aspek pembangunan	1. Persentase Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
Tujuan 3 : Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat miskin	
Sasaran strategis 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Miskin	1. Jumlah perempuan yang telah diberi pelatihan untuk meningkatkan ekonomi keluarga

#### 4. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Sasaran strategis I	
Terkendalinya angka kelahiran dan kematian Ibu dan Anak	
Indikator Kinerja	Target
Rasio Akseptor KB Aktif per jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	3870 Orang
Meningkatnya Pelayanan Akseptor KB baru yang menggunakan Alat kontrasepsi Khususnya MKJP ( Metode Kontrasepsi Jangka Panjang )	230 Orang
Tersedianya Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa	40 org & 36 PIK
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Khususnya Ibu Rumah Tangga, Remaja dan Kelompok Khusus Terhadap Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	150 orang
Sasaran strategis II :	
Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender di segala aspek pembangunan	
Indikator Kinerja	Target
Jumlah Kebijakan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	1 perda 2 kab/kota 100 Orang
Meningkatnya keaktifan Kelembagaan PUG dan Anak se Provinsi Riau	1 Ranperda
Jumlah Perempuan dan Anak yang terlindungi	100 Kasus & 275 Org
Tersedianya kelembagaan PUG dan Anak se Provinsi Riau	38 SKPD & 775 Org
Sasaran strategis III :	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Miskin	
Indikator Kinerja	Target
Jumlah Perempuan yang berkontribusi dalam meningkatkan Produktifitas Ekonomi Keluarga	150 Orang & 120 Kelompok

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

#### A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran strategis I			
Terkendalinya angka kelahiran dan kematian Ibu dan Anak			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terselenggaranya 4 Moment Pencanangan KB (IBI KB Kes, TNI KB Kes, PKK KB Kes & POLRI KB Kes)	2000 Org	2000 Org	100
Jumlah Akseptor KB Aktif yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pembinaan	500 Org	500 Org	100
Jumlah PLKB yang meningkat kompetensinya dalam memberikan pelayanan KB	80 Org	80 Org	100
Jumlah PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsi setelah mengikuti sosialisasi Alkon	200 Org	200 Org	100
Jumlah bidan yang meningkat pengetahuannya dalam memberikan konseling kepada calon akseptor sehingga calon akseptor dapat memutuskan untuk memakai alkon yang diinginkan	60 Org	60 Org	100
Jumlah Masyarakat yang meningkat pengetahuan dan pemahamannya tentang Program KB	50 Org	50 Org	100
Jumlah Kader BKB yang meningkatkan pengetahuannya tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	40 Org	40 Org	100
Jumlah PPKBD yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti orientasi	45 Org	45 Org	100
Jumlah Konselor Sebaya yang memahami Kebijakan Program PKBR	72 Org	72 Org	100
Jumlah PIK Remaja dan Mahasiswa yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pembinaan	36 PIK	36 PIK	100
Jumlah Ibu Rumah Tangga yang meningkat pengetahuannya tentang bahaya Narkoba dan FMS	380 Org	380 Org	100

Sasaran strategis II :			
Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender di segala aspek pembangunan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase keikutsertaan BPPAKB Prov. Riau pada Riau expo	100%	100%	100
Jumlah aparatur yang diberi Sosialisasi Perda No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak	100 Org	100 Org	100
Tersedianya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Jumlah Aparatur yang diberi Sosialisasi Perda tentang Perlindungan Perempuan	100 Org	81 Org	81
Jumlah aparatur dan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pembentukan kelompok PKDRT	100 Org	100 Org	100
Jumlah aparatur Kab/Kota yang memahami konsep Pengarusutamaan Gender	150 Org/ 6 Kab	150 Org/ 6 Kab	100
Jumlah SKPD penggerak yang mendapatkan pelatihan cara menyusun dokumen perencanaan yang responsif Gender	38 SKPD	38 SKPD	100
Jumlah anggota organisasi perempuan yang meningkatkan kompetensinya setelah mendapatkan pembinaan	80 Org	80 Org	100
Jumlah Anak yang ikut serta dalam Peringatan Hari Anak Nasional	351 Org	351 Org	100
Jumlah aparatur Kab/Kota yang menerapkan Kebijakan Percepatan Perwujudan Kab/Kota Layak Anak	75 Org	75 Org	100
Jumlah guru BK dan tenaga penanganan kasus anak yang dapat memenuhi hak anak pada saat penanganan kasus anak	40 Org	40 Org	100
Jumlah Fasilitator forum anak yang meningkatkan kompetensinya setelah mengikuti TOT	40 Org	40 Org	100
Jumlah perempuan yang diberi pendidikan politik	200 Org	200 Org	100
Jumlah aparatur yang memahami proses pembentukan dan pembuatan Gugus Tugas PTPPO	100 Org	100 Org	100
Tersedianya Buku Data Terpilah tentang perempuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Jumlah kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A Provinsi Riau	150 Kasus	170 Kasus	113
Terselenggaranya Peringatan Hari Ibu (PHI)	1 Keg	1 Keg	100
Jumlah Napi yang meningkatkan kompetensinya setelah mendapatkan pelatihan	100 Org	100 Org	100

Sasaran strategis III :			
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Miskin			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah perempuan yang meningkatkan perekonomian keluarganya	45 Org	45 Org	100
Jumlah kepala rumah tangga yang meningkatkan produktivitas ekonominya setelah mengikuti pelatihan	36 Org	36 Org	100
Jumlah perempuan yang meningkatkan pemahaman manajemen usaha dalam mengelola usaha	70 Org	70 Org	100
Jumlah kelompok UP2K yang meningkatkan kompetensinya setelah mendapatkan pembinaan	120 Klpk	120 Klpk	100
Jumlah kader PKK yang paham tentang pengelolaan administrasi UP2K	80 Org	80 Org	100

#### B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran strategis I : Terkendalinya angka kelahiran dan kematian Ibu dan Anak

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Terselenggaranya 4 Moment Pencanangan KB (IBI KB Kes, TNI KB Kes, PKK KB Kes & POLRI KB Kes)	2000 Org	2000 Org	100
2	Jumlah Akseptor KB Aktif yang meningkatkan pengetahuannya setelah mendapatkan pembinaan	500 Org	500 Org	100
3	Jumlah PLKB yang meningkatkan kompetensinya dalam memberikan pelayanan KB	80 Org	80 Org	100
4	Jumlah PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsi setelah mengikuti sosialisasi Alkon	200 Org	200 Org	100
5	Jumlah bidan yang meningkatkan pengetahuannya dalam memberikan konseling kepada calon akseptor sehingga calon akseptor dapat memutuskan untuk memakai alkon yang diinginkan	60 Org	60 Org	100
6	Jumlah Masyarakat yang meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang Program KB	50 Org	50 Org	100
7	Jumlah Kader BKB yang meningkatkan pengetahuannya tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	40 Org	40 Org	100

8	Jumlah PPKBD yang meningkat kompetesinya setelah mengikuti orientasi	45 Org	45 Org	100
9	Jumlah Konselor Sebaya yang memahami Kebijakan Program PKBR	72 Org	72 Org	100
10	Jumlah PIK Remaja dan Mahasiswa yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pembinaan	36 PIK	36 PIK	100
11	Jumlah Ibu Rumah Tangga yang meningkat pengetahuannya tentang bahaya Narkoba dan PMS	380 Org	380 Org	100

Analisis atas capaian indikator – indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- ❖ Terselenggaranya 4 Moment Pencanaan KB (IBI KB Kes, TNI KB Kes, PKK KB Kes & POLRI KB Kes)

Pencanaan Keluarga Berencana ini adalah kerjasama yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dengan mitra yaitu IBI, POLRI, TNI dan PKK dalam rangka menggalakkan kembali Program KB hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dengan capaian kinerja 100 %.

Kegiatan Pencanaan IBI KB KES dilaksanakan pada tanggal 20 April 2016 di Desa Beligan Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu. Pada kegiatan tersebut diadakan sejumlah pelayanan kesehatan diantaranya pengobatan gratis, pemasangan implant dan IUD serta pelayanan KB lainnya. Acara Pencanaan POLRI KB KES dilaksanakan di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Pencanaan Bhakti Sosial TNI Manunggal KB KES dilaksanakan di Lapangan Bola Kaki Simpang Kimu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rohul. Pencanaan PKK KB KES dilaksanakan di Gedung Pendopo Sri Bunga Tanjung Kota Dumai, acara ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh penggerak PKK untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat melalui Posyandu serta pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.

- ❖ Jumlah Akseptor KB Aktif yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pembinaan

Target awal dari kegiatan ini adalah 500 orang peserta dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dengan target capaian 100%. Peringatan Hari Keluarga

Nasional XXIII Tahun 2016 ini merupakan momentum yang tepat untuk terus menerus memasyarakatkan pentingnya fungsi dan peran keluarga dalam memperkuat ketahanan nasional, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 September 2016 di Halaman Gedung Wanita, Jalan Diponegoro No. 36 A Pekanbaru yang dihadiri oleh Gubernur Riau, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau beserta anggota, SKPD di lingkungan Provinsi Riau, Organisasi Profesi, LSOM/LSM, Bupati/Walikota beserta perangkatnya, SKPD KB se-Provinsi Riau, PIK Remaja/Mahasiswa Kota Pekanbaru dan masyarakat umum. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk :

#### 1. Tujuan Umum

Meningkatkan komitmen politisi pemerintahan, Legislatif dan Yudikatif baik ditingkat Pusat, Provinsi hingga Kabupaten dan Kota untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dan Keluarga Berkualitas

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan kepedulian dan peran serta seluruh stakeholder, tokoh agaman, tokoh masyarakat dan LSOM/LSM secara berkesinambungan dalam pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk membangun Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di wilayah masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. Meningkatkan peran Keluarga memulai pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga sebagai dasar ketahanan keluarga yang tangguh
- d. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan keluarga dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga

❖ Jumlah PLKB yang meningkat kompetensinya dalam memberikan pelayanan KB

Untuk memenuhi target kinerja kegiatan ini telah dilaksanakan Pelatihan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dengan 80 orang peserta PLKB Kontrak atau Non PNS dan belum pernah mengikuti pelatihan PLKB. Kegiatan ini terbagi dalam 2 angkatan, setiap angkatan terdiri dari 40 orang peserta yang berasal dari 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kab. Pelalawan, Kab. Inhu, Kab. Siak, Kab. Kuansing dan Kota Dumai. Pelatihan PLKB ini dilaksanakan di Hotel Furaya Pekanbaru selama 3 (tiga) hari untuk masing-masing angkatan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target capaian 100 %. dilaksanakan

sebanyak 40 orang dan pelaksanaannya sesuai dengan target dengan capaiannya 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan PLKB; meningkatkan motivasi PLKB dalam pencapaian sasaran KB di Provinsi Riau; pemberdayaan IMP dan tenaga pengelola/pelaksana KB di lapangan; peningkatan kemampuan dan keterampilan petugas, mitra kerja dan IMP dalam penggerakan pelayanan KB dimasyarakat.

Namun salah satu permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Program Keluarga Berencana yang disebabkan terbatasnya jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di lapangan dari data yang diperoleh jumlah PLKB di Provinsi Riau saat ini 292 orang yang terdiri dari 182 orang PNS dan 110 orang Kontrak sedangkan idealnya sebanyak 806 orang. Salah satu penyebab kurangnya jumlah petugas PLKB adalah terdapatnya perbedaan bentuk kelembagaan Program Kependudukan dan KB pada setiap Kab/Kota sehingga berpengaruh pada kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengalami pergeseran peran sehingga sebagian PLKB beralih tugas dan fungsi, bahkan pindah posisi sebagai Pejabat Struktural seperti Camat, Kepala Dinas dan sebagainya.

❖ Jumlah PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsi setelah mengikuti sosialisasi Alkon

Kegiatan Sosialisasi Alat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Tahun 2016 ini diikuti oleh 200 orang, yang terdiri dari 100 orang PUS Kab. Siak dan 100 orang PUS Kab. Inhu. Target awal dari kegiatan sosialisasi ini sebanyak 200 orang PUS dan pelaksanaan sesuai target yaitu sebanyak 200 orang PUS dengan tingkat capaian 100 %. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2016 di Hotel Grand Royal Kab. Siak dan tanggal 27 Mei 2016 di Kabupaten Inhu.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang kebijakan Program Keluarga Berencana di Provinsi Riau
2. Meningkatkan pengetahuan peserta tentang jenis-jenis dan manfaat alat kontrasepsi
3. Meningkatkan kesadaran peserta tentang pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
4. Peserta bisa menjadi motivator untuk melakukan penggerakkan/sosialisasi kepada lingkungan dan masyarakat sekitarnya



- ❖ Jumlah bidan yang meningkat pengetahuannya dalam memberikan konseling kepada calon akseptor sehingga calon akseptor dapat memutuskan untuk memakai alkon yang diinginkan

Target awal pelatihan dilaksanakan untuk 60 orang Bidan Klinik KB yang berasal dari 12 Kab/Kota se-Provinsi Riau dan pelaksanaannya sesuai target yaitu sebanyak 60 orang Bidan dengan tingkat capaian 100 %. Pelatihan KIP/Konseling dengan menggunakan ABPK merupakan Pelatihan peningkatan kompetensi dimana bidan dilatih untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan menciptakan Komunikasi Interpersonal yang efektif dan pelayanan konseling KB dengan menggunakan ABPK.

ABPK merupakan salah satu dari serangkaian media berupa alat bantu pengambil keputusan yang bertujuan memberikan berbagai informasi mengenai kesehatan reproduksi terutama informasi kelebihan dan kelemahan berbagai alat kontrasepsi secara lengkap dan akurat yang pada akhirnya memudahkan akseptor dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan pilihan penggunaan alat kontrasepsi dengan konsep rasional, efektif dan efisien. Proses konseling dengan menggunakan ABPK dalam pelayanan KB juga mencerminkan pelayanan yang memperhatikan dan menghargai hak-hak reproduksi akseptor.

- ❖ Jumlah Masyarakat yang meningkat pengetahuan dan pemahamannya tentang Program KB

Untuk memenuhi target “Jumlah Masyarakat Peduli KB yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti orientasi” telah dilaksanakan kegiatan Orientasi Masyarakat Peduli KB yang dihadiri 50 orang peserta yang terdiri dari TOGA dan TOMA dan pelaksanaannya sesuai dengan target dengan capaiannya 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta peran aktif peserta dalam pengembangan dan menjaga kelangsungan Program KB Nasional, khususnya Provinsi Riau.

- ❖ Jumlah Kader BKB yang meningkatkan pengetahuannya tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai harapan, dengan target capaian 100%. Orientasi Kader BKB ini dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 17 Mei 2016 di Hotel Winstar Pekanbaru dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang berasal dari 12 Kab/Kota se-Provinsi Riau. Kriteria peserta adalah Tim Penggerak PKK Pokja II Kab/Kota dan Kader BKB yang berada di wilayah Kampung KB Kab/Kota serta

belum pernah mengikuti kegiatan Orientasi Kader Bina Keluarga Balita (BKB). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, masa dibawah lima tahun (balita) disebut “golden periode” yaitu periode yang paling kritis dalam menentukan kualitas SDM karena pada saat itu proses tumbuh kembang berlangsung sangat cepat. Apabila tidak mendapat pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang yang baik, anak akan mengalami gangguan dalam perkembangan emosi, sosial dan kecerdasan.

❖ Jumlah PPKBD yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti orientasi

Untuk memenuhi target “Jumlah PPKBD yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti orientasi” telah dilaksanakan kegiatan Orientasi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yang dihadiri 45 orang peserta yang berasal dari 12 Kab/Kota se-Provinsi Riau. Kriteria peserta adalah Kader PPKBD yang berada di wilayah Kampung KB Kab/Kota dan belum pernah mengikuti pelatihan PPKBD. Pelatihan PPKBD ini dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 11 Agustus 2016 di Hotel Dharma Utama Pekanbaru dan berjalan dengan baik serta sesuai yang direncanakan dengan target capaian 100 %. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan PPKBD dalam melakukan penyuluhan, pengelolaan organisasi kegiatannya serta tata cara pencatatan dan pelaporan untuk mendukung Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

❖ Jumlah Konselor Sebaya yang memahami Kebijakan Program PKBR

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai harapan, dengan target capaian 100%. Pelaksanaan Kegiatan TOT Kebijakan Program PKBR dalam rangka mewujudkan Generasi Berencana se-Provinsi Riau Tahun 2016 ini diikuti oleh 72 orang peserta yang berasal dari 12 Kab/Kota dan terdiri dari Pembina, Pendidik dan Konselor Sebaya se- Provinsi Riau. Kegiatan ini dibagi dalam 2 angkatan dengan jumlah peserta 36 orang untuk masing-masing angkatan, Angkatan I tanggal 5 s.d 9 September 2016 dan angkatan II tanggal 19 s.d 23 September 2016 bertempat di Baliview Luxury Hotel Pekanbaru. Kegiatan ini bertujuan untuk :

1. Tujuan Umum

Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja dan pengelola program PKBR tentang hak-hak reproduksi pada remaja serta perlunya Pendewasaan Usia Perkawinan dalam rangka mewujudkan Tegar Remaja menuju Tegar Keluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil, Bahagia Sejahtera

## 2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan pengetahuan Pembina, pengelola dan remaja tentang Hak-hak Reproduksi
- b. Meningkatkan pengetahuan Pembina, pengelola dan remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan
- c. Meningkatkan pengetahuan Pembina, pengelola dan remaja tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja

❖ Jumlah PIK Remaja dan Mahasiswa yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pembinaan

Target awal kegiatan Pembinaan PIK Remaja dan Mahasiswa ini adalah 36 PIK yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau dan pelaksanaannya sesuai target yaitu sebanyak 36 PIK dengan tingkat capaian 100 %. Pembinaan ini dilakukan di 12 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman PIK Remaja dan Mahasiswa tentang hak-hak reproduksi Remaja serta perlunya Pendewasaan Usia Perkawinan dalam rangka mewujudkan Tegar Remaja menuju Tegar Keluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil, Bahagia Sejahtera.

❖ Jumlah Ibu Rumah Tangga yang meningkat pengetahuannya tentang bahaya Narkoba dan PMS

Ibu Rumah Tangga yang menjadi target capaian kinerja pada kegiatan ini berjumlah 380 orang yang berasal dari 12 Kab/Kota se-Provinsi Riau dan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai yang direncanakan. Kasus HIV/AIDS di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2015 jumlah Ibu Rumah Tangga yang terjangkit HIV/AIDS menduduki peringkat ke 3. Data dari KPA Provinsi Riau Kasus HIV di Provinsi Riau sampai dengan Maret 2016 berjumlah 2055 orang dan kasus AIDS berjumlah 1644 Orang. Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS bagi Ibu Rumah Tangga Tahun 2016 bertujuan :

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya Ibu Rumah Tangga tentang jenis-jenis Narkoba, tanda-tanda pengguna serta sanksi hukum
2. Ibu Rumah Tangga mengetahui cara penanggulangan pengguna/pecandu Narkoba melalui program Rehabilitasi
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya Ibu Rumah Tangga tentang Penyakit Menular Seksual (PMS) yang lebih dikenal dengan HIV/AIDS terutama

tanda-tanda orang tertular HIV/AIDS, cara penularan, pencegahan dan pengobatannya

4. Meningkatkan kesadaran Ibu Rumah tangga untuk menyebarkan informasi yang diperoleh selama penyuluhan

Sasaran strategis II : Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender di segala aspek pembangunan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase keikutsertaan BPPPAKB Prov. Riau pada Riau expo	100%	100%	100
Jumlah aparatur yang diberi Sosialisasi Perda No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak	100 Org	100 Org	100
Tersedianya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Jumlah Aparatur yang diberi Sosialisasi Perda tentang Perlindungan Perempuan	100 Org	81 Org	81
Jumlah aparatur dan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pembentukan kelompok PKDRT	100 Org	100 Org	100
Jumlah aparatur Kab/Kota yang memahami konsep Pengarusutamaan Gender	150 Org/ 6 Kab	150 Org/ 6 Kab	100
Jumlah SKPD penggerak yang mendapatkan pelatihan cara menyusun dokumen perencanaan yang responsif Gender	38 SKPD	38 SKPD	100
Jumlah anggota organisasi perempuan yang meningkatkan kompetensinya setelah mendapatkan pembinaan	80 Org	80 Org	100
Jumlah Anak yang ikut serta dalam Peringatan Hari Anak Nasional	351 Org	351 Org	100
Jumlah aparatur Kab/Kota yang menerapkan Kebijakan Percepatan Perwujudan Kab/Kota Layak Anak	75 Org	75 Org	100
Jumlah guru BK dan tenaga penanganan kasus anak yang dapat memenuhi hak anak pada saat penanganan kasus anak	40 Org	40 Org	100
Jumlah Fasilitator forum anak yang meningkatkan kompetensinya setelah mengikuti TOT	40 Org	40 Org	100
Jumlah perempuan yang diberi pendidikan politik	200 Org	200 Org	100
Jumlah aparatur yang memahami proses pembentukan dan pembuatan Gugus Tugas PTPPO	100 Org	100 Org	100
Tersedianya Buku Data Terpilah tentang perempuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Jumlah kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A Provinsi Riau	150 Kasus	170 Kasus	113
Terselenggaranya Peringatan Hari Ibu (PHI)	1 Keg	1 Keg	100
Jumlah Napi yang meningkat kompetensinya setelah mendapatkan pelatihan	100 Org	100 Org	100

Analisis atas capaian indikator – indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

❖ **Persentase keikutsertaan BPPAKB Prov. Riau pada Riau expo**

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai harapan, dengan target capaian 100%. Kegiatan Riau Expo merupakan event yang diselenggarakan setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi Riau dan diikuti oleh seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota, untuk Tahun 2016 event Riau Expo dilaksanakan di Gedung SKA COEX Pekanbaru.

❖ **Jumlah aparatur yang diberi Sosialisasi Perda No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak**

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai harapan, dengan target capaian 100%. Kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2016 ini dilaksanakan di Kabupaten Meranti dan Kabupaten Inhil dengan 100 orang peserta yang berasal dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Satpol PP, Pengadilan Negeri, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Biro Hukum, Badan/Kantor PPPA dan KB, Lapas Anak serta Forum Anak. Kegiatan ini bertujuan untuk :

- ✓ Tersosialisasinya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 kepada aparatur Pemerintah dan elemen masyarakat
- ✓ Terpenuhi dan terjaminnya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Provinsi Riau
- ✓ Teroptimalnya peran Forum Anak Riau dalam menunjang Program Perlindungan serta Pemenuhan Hak Anak di Provinsi Riau

❖ **Tersedianya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) telah diamanatkan dalam berbagai kebijakan nasional, Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 67

Tahun 2011 perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah, bahwa Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender merupakan implementasi dari strategi Pengarusutamaan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara antara laki-laki dan perempuan di semua bidang pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya PUG di berbagai bidang pembangunan di daerah Riau secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) berisi apa yang harus dilakukan oleh siapa dengan cara bagaimana, dan output/outcomenya apa sehingga strategi PUG benar-benar dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini berjalan baik dan sesuai harapan dengan tingkat capaian kinerja 100 %. Kegiatan ini menghasilkan 1 (satu) dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang diperlukan untuk memberikan acuan/arahan kepada stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai KKG dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah dapat mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan monev PUG secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya KKG di Kabupaten/Kota/Provinsi Riau. Selain dari itu tujuan kegiatan Penyusunan RAD adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi para perencana SKPD tentang urgensi anggaran responsif gender
2. Membangun kapabilitas para perencana untuk menyusun Anggaran Responsif Gender
3. Mendorong adanya komitmen internal dari pihak SKPD dalam menerapkan ARG
4. Mendorong terjadinya perubahan kebijakan anggaran dari netral gender ke responsif gender

#### ❖ Jumlah Aparatur yang diberi Sosialisasi Perda tentang Perlindungan Perempuan

Target awal kegiatan sosialisasi ini adalah 100 orang dan dilaksanakan di 2 Kabupaten namun pada pelaksanaannya jumlah peserta hanya 81 orang atau dengan tingkat capaian kinerja 81 %. Peserta sosialisasi berasal dari Aparat Hukum (Polres/Polsek/Lapas/Pengadilan/Kejari), SKPD (Dinas Sosial, Disnaker, Kemenag,

Perhubungan, Satpol PP), Pengurus P2TP2A, LSM serta Guru-guru di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kuansing. Adapun tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan aparaturnya tentang Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan di Provinsi Riau
2. Mendapatkan bahan masukan bagi penyempurnaan Perda Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

❖ Jumlah aparaturnya dan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pembentukan kelompok PKDRT

Untuk memenuhi target “Jumlah aparaturnya dan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pembentukan kelompok PKDRT” dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembentukan Kelompok PKDRT selama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 27 s.d 29 November 2016 bertempat di Aula Hotel Pesona Pekanbaru. Peserta kegiatan sosialisasi ini berasal dari unsur aparaturnya dan masyarakat berjumlah 100 orang dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini sesuai dengan target dan tingkat capaian kinerja 100%.

❖ Jumlah aparaturnya Kab/Kota yang memahami konsep Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Penerapan PUG akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan.

Sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pengintegrasian PUG di daerah maka dilakukan kegiatan Pendampingan PUG di 6 (enam) Kab/Kota se-Provinsi Riau yaitu Kab. Kepulauan Meranti, Kab. Inhu, Kab. Rohul, Kab. Pelalawan, Kab. Inhil dan Kota Dumai. Kegiatan ini diikuti oleh 150 orang aparaturnya Kab/kota dengan 25 orang peserta per Kab/Kota yang berasal dari SKPD Daerah Kab/Kota tersebut. Secara umum kegiatan ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan dengan tingkat capaian 100 %.

Pada kegiatan pendampingan PUG ini peserta diberikan materi tentang Konsep Gender dan Isu Gender, Konsep PUG dan ARG, Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta langkah pembuatan GAP dan GBS. Diharapkan setelah pelatihan ini peserta mengerti konsep perencanaan yang berwawasan gender dan selanjutnya dapat menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif



gender serta dapat menggerakkan dan mendorong implementasi strategi di tingkat sektoral dan daerah guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

- ❖ Jumlah SKPD penggerak yang mendapatkan pelatihan cara menyusun dokumen perencanaan yang responsif Gender

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender merupakan implementasi dari strategi Pengarusutamaan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara antara laki-laki dan perempuan di semua bidang pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau melalui SKPD BPPAKB Provinsi Riau dalam mempercepat pelaksanaan PUG di daerah adalah dengan melaksanakan kegiatan Pelatihan PPRG bagi SKPD Penggerak se-Provinsi Riau.

Target awal dari pelaksanaan kegiatan ini berjumlah 66 orang peserta yang berasal dari 38 SKPD Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota. Secara umum pelaksanaan kegiatan sesuai harapan dengan capaian kinerja 100 %. Peserta kegiatan ini diberikan materi tentang Konsep Gender dan Isu Gender, Konsep PUG dan ARG, Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta langkah pembuatan GAP dan GBS. Diharapkan setelah pelatihan ini peserta mengerti konsep perencanaan yang berwawasan gender dan dapat menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta dapat menggerakkan dan mendorong implementasi strategi di tingkat sektoral dan daerah guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

- ❖ Jumlah anggota organisasi perempuan yang meningkat kompetensinya setelah mendapatkan pembinaan

Untuk memenuhi target “Jumlah anggota organisasi perempuan yang meningkat kompetensinya setelah mendapatkan pembinaan” dilaksanakan kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan dan target awal kegiatan ini yaitu 80 orang anggota organisasi perempuan yang ada di Provinsi Riau serta pelaksanaan kegiatan sesuai target dengan tingkat capaian 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan dan mengelola organisasi perempuan serta menjalin kerjasama yang baik dalam organisasi yang ada di Provinsi Riau.



#### ❖ Jumlah Anak yang ikut serta dalam Peringatan Hari Anak Nasional

Peringatan Hari Anak Nasional merupakan momentum untuk terus berupaya meningkatkan sekaligus mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak yaitu melakukan upaya perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlakuan tanpa kekerasan, eksploitasi serta diskriminasi. Ini merupakan komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan hidup anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Dalam rangka menunjang komitmen Pemerintah Pusat maka Pemerintah Provinsi Riau melalui BPPAKB Provinsi Riau melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak yang mengusung agenda utama yaitu Pertemuan Forum Anak Se-Provinsi Riau; Peringatan Hari Anak Tingkat Provinsi Riau dan Seminar Parenting Pengasuhan Anak dalam keluarga. Capaian kinerja kegiatan ini 100% sesuai dengan yang direncanakan. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- ✓ Terciptanya wahana bagi anak untuk berkreasi, berekspresi, mengeluarkan pendapat dan memperoleh ilmu pengetahuan
- ✓ Memberikan informasi kepada masyarakat dan keluarga tentang pentingnya membangun karakter anak melalui peningkatan dan pengoptimalan pola pengasuhan dalam keluarga serta mempercepat penanaman nilai-nilai kebangsaan
- ✓ Mendorong peningkatan komitmen tentang kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak

#### ❖ Jumlah aparatur Kab/Kota yang menerapkan Kebijakan Percepatan Perwujudan Kab/Kota Layak Anak

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai harapan, dengan target capaian 100%. Kegiatan ini dilaksanakan di 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kuansing, Kabupaten Rohul dan Kota Dumai dengan 25 orang peserta pada masing-masing Kabupaten yang difokuskan pada pemangku kebijakan dan instansi/lembaga terkait dalam Gugus Tugas KLA tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan utama dari kegiatan ini antara lain :

1. Melakukan evaluasi terkait pelaksanaan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) se-Provinsi Riau di Kabupaten Kuansing, Kabupaten Rohul dengan melibatkan 1

- Kabupaten/Kota yang telah menerima penghargaan KLA di Provinsi Riau, yaitu Kota Dumai sebagai pendamping/model pengembangan KLA di Kab. Kuansing dan Rohul
2. Menjadikan Kab/Kota yang telah menerima penghargaan KLA sebagai model percontohan/pendampingan pengembangan KLA bagi Kab/Kota lain yang belum meraih penghargaan
  3. Mengumpulkan informasi sebagai persiapan dasar mewujudkan KLA
  4. Melakukan koordinasi lintas sektoral dengan instansi dan lembaga terkait
  5. Merumuskan infrastruktur untuk menciptakan Kota Layak Anak
  6. Merumuskan struktur untuk menciptakan Kota Layak Anak

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Terintegrasinya program pemenuhan hak dan perlindungan anak secara paripurna pada program pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota
2. Penguatan kelembagaan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Provinsi Riau
3. Terjamin, Terlindungi dan terpenuhinya hak-hak anak
4. Mewujudkan Provinsi Riau layak anak

❖ Jumlah guru BK dan tenaga penanganan kasus anak yang dapat memenuhi hak anak pada saat penanganan kasus anak

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Mereka perlu dipersiapkan demi kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap Convention on the right of the Child (CRC) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB berdasarkan Resolusi 44/23 Tahun 1989, dimana nilai – nilai yang diutamakan pada CRC adalah *Perlindungan, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak*. Kemudian CRC diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 dan mulai berlaku sejak tanggal 5 Oktober 1990.

Seiring dengan berjalannya waktu akhir – akhir ini marak terungkap kasus perampasan hak anak yang dilakukan orang terdekat anak (ex. Orang tua/keluarga, guru dan masyarakat dilingkungan terdekat tinggal anak), hal ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi para pemerhati dunia perlindungan anak terutama pemerintah sebagai komando pemegang regulasi pembuatan peraturan dan penciptaan suasana yang layak dan ramah terhadap pemenuhan hak dasar anak.

SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau memandang perlu memberikan pemahaman (mengadvokasi)

orang tua, guru, masyarakat beserta forum anak dan lembaga penanganan kasus anak dalam bentuk kegiatan “Pemenuhan Hak Anak bagi Guru BK dan Tenaga Penanganan Kasus Anak Provinsi Riau”. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan dengan 20 orang peserta pada masing-masing kabupaten. Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan sesuai harapan dengan capain kinerja 100 %. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Teradvokasinya orang tua, tenaga pendidik/guru BK, forum anak dan tenaga penanganan kasus anak di Provinsi Riau
2. Menurunnya angka kekerasan terhadap anak
3. Teroptimalkannya peran Forum Anak Riau dalam menunjang program perlindungan serta pemenuhan hak anak di Provinsi Riau
4. Terlaksananya pengiriman Duta Anak Riau pada kegiatan Forum Anak Nasional
5. Terpenuhinya dan terjaminnya pemenuhan hak anak di Provinsi Riau

❖ Jumlah Fasilitator forum anak yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti TOT

Menindaklanjuti ditunjuknya Provinsi Riau sebagai tuan rumah pelaksana kegiatan Pertemuan Forum Anak Nasional Tahun 2017 yang juga merupakan bagian integral dari Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2017, keberadaan Fasilitator yang telah tersertifikasi di Provinsi Riau perlu ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun keilmuan dan keterampilan. Hal ini dimaksudkan agar Fasilitator yang tersertifikasi dan dinilai baik tersebut dapat dioptimalkan keberadaannya sebagai Liaison Officer (LO) Daerah Pendamping LO Nasional pada event yang akan dihadiri oleh seluruh Forum Anak Daerah se-Indonesia.

Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau melaksanakan kegiatan TOT Fasilitator Forum Anak se-Provinsi Riau selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 s.d 30 November 2016 di Hotel Grand Zuri Pekanbaru. Peserta kegiatan ini berjumlah 40 orang yang difokuskan pada Fasilitator dan Pengurus Forum Anak Provinsi maupun Kabupaten/Kota baik yang aktif maupun mantan (pengurus sebelumnya) yang belum tersertifikasi. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai target dengan peserta sebanyak 40 orang serta tingkat capaian kinerja 100 %. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Menciptakan Fasilitator Anak yang handal dan tersertifikasi di Provinsi Riau
2. Mendukung percepatan program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Provinsi Riau

3. Mensukseskan penyelenggaraan Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2017 di Provinsi Riau
4. Menciptakan generasi tangguh, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berwawasan Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Berkepribadian Luhur dan kreatif, inovatif serta unggul
5. Menciptakan Provinsi Riau yang layak dan ramah bagi tumbuh kembang anak

❖ Jumlah perempuan yang diberi pendidikan politik

Perempuan sebagai manusia mempunyai hak yang sama, adil dan setara dengan laki-laki dalam setiap bidang kehidupan sebagaimana yang tertuang dalam deklarasi dan program aksi WINA 1993 mengatakan bahwa “Hak azazi perempuan adalah bagian dari hak azazi manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan. Namun saat ini belum meratanya kesempatan dan akses yang diperoleh perempuan di segala bidang baik pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik. Hal ini mengakibatkan rendahnya kualitas hidup perempuan dari segala aspek kehidupan terutama dibidang politik yang berdampak terhadap masih rendahnya partisipasi perempuan dibidang politik terbukti dengan minimnya jumlah perempuan di parlemen. Akibat dari ketidakadilan tersebut adalah banyak kebijakan yang tidak memperhatikan kepentingan kaum perempuan. Untuk meminimalisir kondisi tersebut perlu dilakukan upaya-upaya program yang harus dicanangkan Pemerintah Daerah.

Kegiatan Pelatihan Pendidikan Politik bagi Perempuan merupakan salah satu kegiatan SKPD BPPPAKB Provinsi Riau yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi ilmu dan pengetahuan politik perempuan menuju kursi parlemen/kursi legislatif. Kegiatan ini direncanakan untuk 200 orang perempuan yang berasal dari 12 Kab/Kota se-Provinsi Riau dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dengan realisasi capaian 100 %. Pelatihan dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 28 s.d 29 November 2016 bertempat di Hotel Furaya Pekanbaru.

❖ Jumlah aparatur yang memahami proses pembentukan dan pembuatan Gugus Tugas PTPPO

Trafficking (perdagangan) perempuan dan anak adalah tindakan yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah atau antar Negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan verbal atau fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan

pelacuran, eksploitasi seksual, buruh migran, legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerja jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, industri pornografi, pengedar obat terlarang, pemindah organ/tubuh serta bentuk eksploitasi lainnya.

TPPO (Trafficking) merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia sekaligus bentuk terburuk terhadap pelanggaran harkat dan martabat manusia, oleh karena itu harus diberantas. Faktor-faktor resiko terjadinya trafficking sangat beragam sehingga upaya yang menyeluruh. Dalam rangka upaya penghapusan perdagangan perempuan dan anak telah dikeluarkan Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, dengan Keppres ini dibentuk Gugus Tugas di Tingkat Nasional untuk mengkoordinasikan pelaksanaan upaya penghapusan perdagangan perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan tugas fungsi regional dan internasional. Untuk itu perlu dilakukan advokasi tentang bahaya trafficking kepada SKPD, LSM maupun masyarakat yang berada di Kab/Kota dan perlunya membentuk Gugus Tugas di setiap Kab/Kota.

Salah satu upaya SKPD BPPAKB Provinsi Riau dalam penghapusan trafficking adalah melakukan kegiatan Advokasi PTPPO Kab/Kota se-Provinsi Riau. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 Kab/Kota yaitu Kab. Inhu, Kab. Rohul, Kab. Rohil dan Kab. Inhil dengan 25 orang peserta pada masing-masing Kabupaten. Peserta berasal dari SKPD terkait, Aparat Hukum, LSM, Ormas, LK3 dan PKK. Kegiatan ini berjalan lancar sesuai dengan target capaian 100 %. Kegiatan Advokasi PTPPO ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tenaga penanganan PTPPO dalam menangani kasus Trafficking. Salah satu hambatan yang ditemui dilapangan adalah belum semua Kabupaten/Kota memiliki kesanggupan untuk membentuk Gugus Tugas PTPPO sehingga apabila terjadi kasus trafficking masih P2TP2A Kab/Kota yang menangani kasus tersebut.

#### ❖ Tersedianya Buku Data Terpilah tentang perempuan

Target awal dari pelaksanaan kegiatan Pemetaan dan Penyusunan Data Perempuan Riau adalah membuat sebuah buku data terpilah tentang perempuan. Secara umum kegiatan ini berjalan lancar dengan tingkat capaian 100 %.

#### ❖ Jumlah kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A

Target awal dari kegiatan Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan ini sebanyak 150 kasus namun pada pelaksanaannya melebihi target yaitu 170 kasus dengan tingkat capaian 113 %. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan kasus yang dilaporkan ke P2TP2A Provinsi Riau dimana kasus yang banyak ditangani adalah kasus kekerasan terhadap perempuan anak. Disamping penanganan

kasus pada kegiatan ini juga dilaksanakan capacity building SDM yang dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan dan Kampar dengan 40 orang peserta yang berasal dari unsur SKPD, Aparat Hukum dan Tim P2TP2A Kab/Kota, P2TP2A Provinsi serta LSM. Capacity building ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap penanganan dan pendampingan kasus kekerasan perempuan dan anak.

#### ❖ Terselenggaranya Peringatan Hari Ibu (PHI)

Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan yang diwujudkan dalam Peringatan Hari Ibu (PHI) diselenggarakan pada 20 Desember 2016 di Halaman Kantor Gubernur Riau. Secara umum kegiatan PHI ini terselenggara dengan baik tanpa hambatan yang berarti dengan tingkat capaian 100%. Kegiatan ini dimaksudkan agar seluruh warga Provinsi Riau baik laki-laki dan perempuan terutama generasi muda senantiasa mengenang dan menyegarkan kembali ingatannya akan pentingnya pemahaman dan penghayatan serta arti perjuangan dan kebangkitan kaum perempuan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebangkitan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Meningkatkan aspirasi masyarakat terhadap keluhuran kodrat, harkat dan martabat, peranan dan kedudukan kaum perempuan Indonesia dalam upaya peningkatan keutuhan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat melalui peningkatan kualitas peran dalam berbagai aktifitas pembangunan. Beberapa kegiatan penunjang Peringatan Hari Ibu (PHI) ke 88 Tahun 2016 diantaranya :

- ✓ Penilaian Lomba P2WKSS, KSI, UP2K dan Kader PKK Tingkat Provinsi
- ✓ Seminar
- ✓ Senam Massal
- ✓ Pemberian Penghargaan
- ✓ Ziarah Makam Pahlawan
- ✓ Upacara Puncak Peringatan Hari Ibu

#### ❖ Jumlah Napi yang meningkat kompetensinya setelah mendapatkan pelatihan

Untuk memenuhi target “Jumlah Napi yang meningkat kompetensinya setelah mendapatkan pelatihan” dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kompetensi NAPI di Lembaga Pemasyarakatan dan target awal kegiatan ini yaitu 100 orang Napi perempuan dan pelaksanaannya sesuai target dengan tingkat capaian 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan napi perempuan dan menjalin kerjasama yang baik antara sesama napi. Diharapkan dengan kegiatan ini napi mempunyai keterampilan yang dapat digunakan nanti setelah mereka keluar dari Lapas.

### Sasaran strategis III : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah perempuan yang meningkatkan perekonomian keluarganya	45 Org	45 Org	100
Jumlah kepala rumah tangga yang meningkat produktivitas ekonominya setelah mengikuti pelatihan	36 Org	36 Org	100
Jumlah perempuan yang meningkat pemahaman manajemen usaha dalam mengelola usaha	70 Org	70 Org	100
Jumlah kelompok UP2K yang meningkat kompetensinya setelah mendapatkan pembinaan	120 Klpk	120 Klpk	100
Jumlah kader PKK yang paham tentang pengelolaan administrasi UP2K	80 Org	80 Org	100

Analisis atas capaian indikator – indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

#### ❖ Jumlah perempuan yang meningkatkan perekonomian keluarganya

Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) adalah sebuah desa percontohan untuk menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin dengan memanfaatkan seluruh potensi/sumber daya, baik sumber daya manusia, serta mengkoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan. Pengembangan Model Desa Prima merupakan bagian dari kebijakan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) mendorong upaya peningkatan pemberdayaan perempuan baik di masyarakat maupun di Pemerintah Daerah setempat yang secara bersama-sama bersinergi menfokuskan program dalam rangka peningkatan produktifitas ekonomi perempuan.

Pada tahun 2016 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau melaksanakan kegiatan Pelatihan Model Desa Prima di 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Siak (Desa Perawang Barat Kec. Tualang), Kabupaten Kepulauan Meranti (Desa Alah Air) dan Kota Dumai (Kelurahan Bagan Keladi Kec. Dumai Barat) dengan 15 orang peserta masing-masing kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan target awal yaitu 45 orang peserta dan target capaian 100%. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari dan peserta diberikan skill atau keahlian dalam mengolah kue kering layak jual kepada masyarakat khususnya kaum perempuan.



❖ Jumlah perempuan kepala rumah tangga yang meningkat produktivitas ekonominya setelah mengikuti pelatihan

Target awal pelatihan ini sebanyak 36 orang perempuan kepala rumah tangga dan pelaksanaannya sesuai target dengan capaiannya 100%. Kegiatan pelatihan keterampilan bagi Perempuan Kepala Rumah Tangga ini di laksanakan selama 4 (empat) hari di Royal Asnof Hotel Pekanbaru dengan 36 orang peserta yang berasal dari 12 Kab/kota, masing – masing Kab/Kota mengirimkan 3 orang peserta. Maksud diadakan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para perempuan kepala rumah tangga tentang manajerial usaha seperti produksi, pemasaran, pembukuan dan promosi dalam menjalankan usahanya
2. Meningkatkan penghasilan dan pendapatan keluarga perempuan kepala rumah tangga sehingga keluarganya menjadi lebih sejahtera
3. Meningkatkan pemahaman peserta tentang keadilan dan kesetaraan gender
4. Memberi pemahaman tentang visi, misi dan strategi pemberdayaan perempuan kepala rumah tangga serta pengorganisasian dan pengembangan organisasi komunitas PEKKA
5. Memberi pemahaman tentang mekanisme pendampingan kelompok usaha perempuan kepala rumah tangga

❖ Jumlah perempuan yang meningkat pemahaman manajemen usaha dalam mengelola usaha

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai harapan, dengan target capaian 100%. Kegiatan ini dilaksanakan di 3 (tiga) hari pada tanggal 29 s.d 31 Agustus 2016 bertempat di Royal Asnof Hotel Pekanbaru dengan 70 orang peserta dari unsur Badan PP & KB Kab/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota, Disperindagkop, GOW serta Perempuan Pelaku Usaha se-Provinsi Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk :

1. Membangun komitmen dan sinergitas bersama dengan SKPD dan organisasi-organisasi terkait dalam meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan di Provinsi Riau
2. Membangun jejaring dan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak terkait, baik pihak pemerintah, maupun organisasi serta pihak swasta
3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi perempuan dalam mengelola dan mengembangkan usahanya
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi perempuan untuk mengembangkannya potensi dirinya serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui pengembangan dan penguatan aktivitas ekonomi produktif



5. Memperkuat kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pendampingan kelompok-kelompok usaha ekonomi perempuan

❖ Jumlah kelompok UP2K yang meningkat kompetensinya setelah mendapatkan pembinaan

Target awal kegiatan Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) ini adalah 120 kelompok UP2K yang ada di Provinsi Riau. Kegiatan ini dilaksanakan di 12 Kabupaten/Kota dengan jumlah peserta 10 kelompok UP2K pada masing-masing Kab/Kota dan pelaksanaannya sesuai yang direncanakan dengan tingkat capaian 100%. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pembinaan dalam hal pembukuan dan meningkatkan pemahaman anggota kelompok UP2K tentang pengelolaan dan pengembangan usaha ekonomi keluarga.

❖ Jumlah kader PKK yang paham tentang pengelolaan administrasi UP2K

Untuk memenuhi target “Jumlah kader PKK yang paham tentang pengelolaan administrasi UP2K” dilaksanakan kegiatan Pelatihan Penyusunan Administrasi UP2K TP PKK Provinsi Riau selama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 1 s.d 3 Desember 2016 bertempat di Hotel Furaya Pekanbaru. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang ditargetkan yaitu dengan 80 orang peserta dan tingkat realisasi 100 %. Adapun peserta berasal dari unsur Badan PP-PA Kab/Kota, TP PKK Kab/Kota dan kecamatan se-Provinsi Riau. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah untuk menyatukan pemahaman dan persepsi tentang administrasi UP2K kepada peserta agar ada keseragaman pada pembinaan kelompok UP2K di masing-masing daerah terutama menyangkut pembukuan UP2K PKK yang awalnya berjumlah 6 buku menjadi 3 buku (lebih simpel dan efektif); meningkatkan pemahaman TP PKK dan kader UP2K PKK tentang pengelolaan dan pengembangan usaha ekonomi keluarga.

### C. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran dan kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pagu Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 19.364.516.948,- (Sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), dengan rincian :
  - Belanja Pegawai Rp. 9.726.373.491,-
  - Belanja Barang / jasa Rp. 9.394.882.975,-
  - Belanja Modal Rp. 243.260.482,-

2. Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.17.723.669.839,- (Tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 91,53 % dari pagu anggaran, dengan rincian :

- Belanja Pegawai Rp. 8.918.732.751,-
- Belanja Barang / jasa Rp. 8.576.022.088,-
- Belanja Modal Rp. 228.915.000,-

Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2016

No	Program	Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.538.000.482	Rp. 1.384.871.593	90
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 175.000.000	Rp. 158.057.600	90
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 78.000.000	Rp. 71.206.500	91
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 98.824.000	Rp. 85.724.100	86
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 424.501.410	Rp. 343.364.010	80
6	Program Pengembangan Data / Informasi	Rp. 60.000.000	Rp. 56.304.000	93
7	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp. 586.319.255	Rp. 539.939.209	92
8	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp. 2.234.916.344	Rp. 2.084.513.130	93
9	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp. 968.178.675	Rp. 780.901.193	80
10	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Rp. 1.638.342.363	Rp. 1.514.043.237	92
11	Program Keluarga Berencana	Rp. 1.366.000.000	Rp. 1.333.703.967	97
12	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Rp. 336.240.000	Rp. 302.778.500	90
13	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Rp. 575.629.000	Rp. 553.659.249	96
14	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba PMS termasuk HIV/AIDS	Rp. 768.300.000	Rp. 749.370.800	97
		Rp. 10.848.251.529	Rp. 9.958.437.088	91

Realisasi Anggaran per 31 Desember 2016

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
			ANGGARAN	%
1	Realisasi Pendapatan Daerah Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp -	Rp -	0
2	Realisasi Belanja			
	- Belanja Pegawai	Rp 9.726.373.491	Rp 8.918.732.751	91,69
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp 9.394.882.975	Rp 8.576.022.088	91,28
	- Belanja Modal	Rp 243.260.482	Rp 228.915.000	94,10

Penjelasan per pos dari realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

1. *Belanja Pegawai*

Pagu anggaran Belanja Pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 9.726.373.491,- dengan nilai realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 8.918.732.751,- atau sebesar 91,69 % dari pagu belanja pegawai BPPPAKB Provinsi Riau.

2. *Belanja Barang dan Jasa*

Pagu anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 9.394.882.975,- dengan nilai realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 8.576.022.088,- atau sebesar 91,28 % dari pagu belanja barang dan jasa BPPPAKB Provinsi Riau.

3. *Belanja Modal*

Pagu anggaran Belanja Modal Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 243.260.482,- dengan nilai realisasi belanja modal sebesar Rp. 228.915.000,- atau sebesar 94,10 % dari pagu belanja modal BPPPAKB Provinsi Riau.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yang diberikan tugas, tanggung jawab dan amanah untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019, dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berbagai pencapaian target indikator kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tupoksi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

### B. Saran

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga hak – hak perempuan dan anak dapat terpenuhi
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja / anggaran dari pola *“top down”* menjadi *“bottom up”* sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya

yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan
5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dengan melibatkan segenap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha
6. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dengan laporan keuangan sebagai suatu kesatuan sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *out put* maupun *out comes* kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja dari setiap lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel

Pekanbaru, Januari 2017

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA  
BERENCANA PROVINSI RIAU

Dra. T. Hidayati Effiza, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.19611219 198503 2 005

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
A.	Latar Belakang .....	1
B.	Tugas Pokok dan fungsi .....	1
C.	Aspek Strategis .....	2
D.	Struktur Organisasi .....	2
E.	Sistematika Penyusunan .....	3
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA</b>	
A.	RPJMD 2014-2019 .....	4
B.	Visi dan Misi SKPD .....	5
C.	Tujuan dan sasaran .....	6
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A.	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 .....	9
B.	Analisis Capaian Kinerja .....	11
C.	Akuntabilitas Keuangan .....	31
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Simpulan .....	34
B.	Saran .....	34
<b>LAMPIRAN</b>		
-	Rencana Kinerja Tahunan	
-	Pengukuran Kinerja Tahunan	
-	Rencana Kinerja Kegiatan	
-	Pengukuran Kinerja Kegiatan	



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Seluruh program kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Penetapan Kinerja Kepala BPPAKB Provinsi dengan Gubernur dan Rencana Strategis (Renstra) BPPAKB Provinsi Riau tahun 2009-2016 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2016. Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 50 indikator kinerja dan 50 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari tiga sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016, hampir seluruh sasaran dapat berhasil dilaksanakan dengan baik dan target pencapaian 100 %.

Sasaran strategis I			
Terkendalinya angka kelahiran dan kematian Ibu dan Anak			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsi setelah mengikuti sosialisasi Alkon	200 orang	200 orang	100
Jumlah PLKB yang meningkat kompetensinya setelah diberi pelatihan	40 orang	40 orang	100
Jumlah keikutsertaan stakeholder dalam Pembinaan KB	1100 orang	1100 orang	100
Jumlah Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK Remaja yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti TOT Program PKBR dalam mewujudkan Gendre	36 orang	36 orang	100
Jumlah bidan yang meningkat pengetahuannya dalam memberikan konseling kepada calon akseptor sehingga calon akseptor dapat memutuskan untuk memakai alkon yang diinginkan	40 orang	40 orang	100



Jumlah peserta KB MOW dan MOP	200 orang	112 orang	56
Jumlah kelompok khusus yang memahami penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS setelah diberi penyuluhan	250 orang	250 orang	100
Jumlah Aparatur Pembina KB Daerah yang meningkat kompetensinya setelah diberi pembinaan	36 orang	~	~
Jumlah peserta KB baru dan peserta KB ganti cara	2500 orang	~	~
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I			100
Sasaran strategis II :			
Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender di segala aspek pembangunan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah anggota Gugus Tugas PTPPO yang diberi sosialisasi tentang PTPPO	75 Orang	75 Orang	100
Jumlah generasi muda yang tampil aktif, kreatif dan inovatif dalam mengembangkan bakat dan kreatifitas pada peringatan Hari Anak Nasional	1100 orang	1100 orang	100
Jumlah guru BK dan tenaga penanganan kasus anak yang dapat memenuhi hak anak pada saat penanganan kasus anak	100 orang	100 orang	100
Persentase pemetaan dan pendataan permasalahan perlindungan anak se-Provinsi Riau	80 %	80 %	100
Terpublikasinya Iklan Layanan Masyarakat tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	1 Paket	1 Paket	100
Jumlah anggota Gugus Tugas PTPPO yang membentuk kesepakatan dalam penanganan kasus Trafficking	30 orang	30 orang	100
Jumlah kasus perempuan dan anak yang ditangani sampai selesai	45 orang 75 kasus	45 orang 45 kasus	60
Jumlah P2TP2A Kab/Kota yang di monitoring dan dievaluasi	12 P2TP2A	5 P2TP2A	42
Jumlah organisasi perempuan yang mendapat pembinaan	40 orang	27 orang	67
Jumlah anak yang dapat menjadi motivator bagi anak-anak di Provinsi Riau agar lebih kreatif dan inovatif	30 orang	30 orang	100
Persentase Kab/Kota yang menerapkan Pengarusutamaan Gender	80 %	80 %	100
Jumlah focal point di SKPD yang mampu menyusun dokumen anggaran responsif gender	50 orang	50 orang	100
Jumlah Data Perempuan Riau	30 orang	27 orang	90
Persentase keikutsertaan organisasi perempuan dalam Peringatan Hari Ibu (PHI)	50 %	50 %	100
Jumlah aparatur kab/kota yang menerapkan	60 orang	~	~

kebijakan percepatan perwujudan Kab/Kota Layak Anak			
Jumlah aparatur dan guru yang diberi TOT PNBAI	60 orang	~	~
Jumlah aparatur yang diberi sosialisasi Undang-undang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100 orang	~	~
Jumlah perempuan yang dapat berbicara dimuka umum setelah diberi pelatihan publik speaking	100 orang	~	~
Jumlah anak laki-laki dan perempuan putus sekolah yang menciptakan lapangan pekerjaan setelah diberi pelatihan	50 orang	~	~
Jumlah IRT dan Remaja yang diberi penyuluhan HIV/AIDS	100 orang	~	~
Jumlah aparatur, organisasi perempuan dan masyarakat yang diberi sosialisasi tentang Gender	50 orang	~	~
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II			100
Sasaran strategis III :			
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Miskin			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah kelompok UP2K yang meningkat pengelolaan administrasinya	120 klpk	120 klpk	100
Jumlah kelompok UP2K yang dimonitoring dan dievaluasi	120 klpk	120 klpk	100
Jumlah perempuan kepala keluarga miskin yang meningkat kompetensinya untuk menjadi keluarga yang mandiri	40 orang	40 orang	100
Jumlah perempuan miskin yang diberi keterampilan menjahit dan membuat kue	48 orang	48 orang	100
Jumlah calon/ibu rumah tangga yang meningkat pengetahuan dan pemahamannya tentang keluarga berkualitas	70 orang	~	~
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III			100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BPPAKB PROVINSI RIAU  
TAHUN 2016



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA  
BERENCANA  
Jl. Pepaya NO. 67 Telp. (0761) 40311, 40312, 40313 Fax. (0761) 40313  
PEKANBARU



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau adalah suatu lembaga pemerintah Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada point 1, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum di bidang Sekretariat, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang Sekretariat, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Berkaitan dengan pencapaian target RPJMD Tahun 2016 – 2019, ditetapkan pokok strategis dan kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau yang difokuskan pada 6 (enam) strategi yaitu :

1. Memantapkan Program Keluarga Berencana
2. Mendorong Peran Perempuan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga
3. Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Mengoptimalkan Peran Perempuan di bidang Politik
5. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak
6. Meningkatkan upaya Perlindungan Perempuan dan Anak di berbagai bidang

Program kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Penjanjian Kinerja Kepala BPPPAKB Provinsi Riau dengan Gubernur dan Rencana Strategis (Renstra) BPPPAKB Provinsi Riau tahun 2014 – 2019 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2016. Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 34 indikator kinerja dan 34 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, hampir seluruh sasaran dapat dilaksanakan dengan baik dan rata-rata target pencapaian 100 %.

Sasaran strategis I			
Terkendalinya angka kelahiran dan kematian Ibu dan Anak			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terselenggaranya 4 Moment Pencanangan KB (IBI KB Kes, TNI KB Kes, PKK KB Kes & POLRI KB Kes)	2000 Org	2000 Org	100
Jumlah Akseptor KB Aktif yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pembinaan	500 Org	500 Org	100
Jumlah PLKB yang meningkat kompetensinya dalam memberikan pelayanan KB	80 Org	80 Org	100
Jumlah PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsi setelah mengikuti sosialisasi Alkon	200 Org	200 Org	100
Jumlah bidan yang meningkat pengetahuannya dalam memberikan konseling kepada calon akseptor sehingga calon akseptor dapat memutuskan untuk memakai alkon yang diinginkan	60 Org	60 Org	100
Jumlah Masyarakat yang meningkat pengetahuan dan pemahamannya tentang Program KB	50 Org	50 Org	100
Jumlah Kader BKB yang meningkatkan pengetahuannya tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	40 Org	40 Org	100
Jumlah PPKBD yang meningkat kompetesinya setelah mengikuti orientasi	45 Org	45 Org	100
Jumlah Konselor Sebaya yang memahami Kebijakan Program PKBR	72 Org	72 Org	100
Jumlah PIK Remaja dan Mahasiswa yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pembinaan	36 PIK	36 PIK	100
Jumlah Ibu Rumah Tangga yang meningkat pengetahuannya tentang bahaya Narkoba dan PMS	380 Org	380 Org	100

Sasaran strategis II :			
Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender di segala aspek pembangunan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase keikutsertaan BPPPAKB Prov. Riau pada Riau expo	100%	100%	100
Jumlah aparatur yang diberi Sosialisasi Perda No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak	100 Org	100 Org	100
Tersedianya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Jumlah Aparatur yang diberi Sosialisasi Perda tentang Perlindungan Perempuan	100 Org	81 Org	81
Jumlah aparatur dan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pembentukan kelompok PKDRT	100 Org	100 Org	100
Jumlah aparatur Kab/Kota yang memahami konsep Pengarusutamaan Gender	150 Org/ 6 Kab	150 Org/ 6 Kab	100
Jumlah SKPD penggerak yang mendapatkan pelatihan cara menyusun dokumen perencanaan yang responsif Gender	38 SKPD	38 SKPD	100
Jumlah anggota organisasi perempuan yang meningkatkan kompetensinya setelah mendapatkan pembinaan	80 Org	80 Org	100
Jumlah Anak yang ikut serta dalam Peringatan Hari Anak Nasional	351 Org	351 Org	100
Jumlah aparatur Kab/Kota yang menerapkan Kebijakan Percepatan Perwujudan Kab/Kota Layak Anak	75 Org	75 Org	100
Jumlah guru BK dan tenaga penanganan kasus anak yang dapat memenuhi hak anak pada saat penanganan kasus anak	40 Org	40 Org	100
Jumlah Fasilitator forum anak yang meningkatkan kompetensinya setelah mengikuti TOT	40 Org	40 Org	100
Jumlah perempuan yang diberi pendidikan politik	200 Org	200 Org	100
Jumlah aparatur yang memahami proses pembentukan dan pembuatan Gugus Tugas PTPPO	100 Org	100 Org	100
Tersedianya Buku Data Terpilah tentang perempuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Jumlah kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A Provinsi Riau	150 Kasus	170 Kasus	113
Terselenggaranya Peringatan Hari Ibu (PHI)	1 Keg	1 Keg	100
Jumlah Napi yang meningkatkan kompetensinya setelah mendapatkan pelatihan	100 Org	100 Org	100

Sasaran strategis III :			
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Miskin			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah perempuan yang meningkatkan perekonomian keluarganya	45 Org	45 Org	100
Jumlah kepala rumah tangga yang meningkatkan produktivitas ekonominya setelah mengikuti pelatihan	36 Org	36 Org	100
Jumlah perempuan yang meningkatkan pemahaman manajemen usaha dalam mengelola usaha	70 Org	70 Org	100
Jumlah kelompok UP2K yang meningkatkan kompetensinya setelah mendapatkan pembinaan	120 Klpk	120 Klpk	100
Jumlah kader PKK yang paham tentang pengelolaan administrasi UP2K	80 Org	80 Org	100

Dari pagu anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2016 sebesar Rp. 10.848.251.259,- (*Sepuluh milyar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 9.958.437,088,- (*Sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah*) sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 889.814.441 ,- (*Delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah*)

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan secara fisik selesai *96,05 %* dan dari sisi keuangan mencapai *91,80 %* tidak termasuk belanja tidak langsung.



Pagu anggaran dan realisasi penggunaan

Pagu anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan seluruh kegiatan berdasarkan DPA SKPD BPPPAKB Provinsi Riau tahun 2016

Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2016

No	Program	Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.538.000.482	Rp. 1.384.871.593	90
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 175.000.000	Rp. 158.057.600	90
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 78.000.000	Rp. 71.206.500	91
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 98.824.000	Rp. 85.724.100	86
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 424.501.410	Rp. 343.364.010	80
6	Program Pengembangan Data / Informasi	Rp. 60.000.000	Rp. 56.304.000	93
7	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp. 586.319.255	Rp. 539.939.209	92
8	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp. 2.234.916.344	Rp. 2.084.513.130	93
9	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp. 968.178.675	Rp. 780.901.193	80
10	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Rp. 1.638.342.363	Rp. 1.514.043.237	92
11	Program Keluarga Berencana	Rp. 1.366.000.000	Rp. 1.333.703.967	97
12	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Rp. 336.240.000	Rp. 302.778.500	90
13	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Rp. 575.629.000	Rp. 553.659.249	96
14	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba PMS termasuk HIV/AIDS	Rp. 768.300.000	Rp. 749.370.800	97
		Rp. 10.848.251.259	Rp. 9.958.437.088	91,80

